

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2014-2019



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Batanghari Jambi

Disusun oleh :

DIAN MUTIA PUTRI

1700860201003

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2021

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi sebagai berikut :

NAMA : Dian Mutia Putri

NIM : 1700860201003

PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan

JUDUL : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019.

Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di uji pada skripsi dan Komrehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Jambi, 07 Juli 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Evi Adriani, SE, M.Si)

(Hasminidiarty, SE, M.Si)

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Hj. Susilawati, SE, M.Si)

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji Skripsi dan Komprehensif Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Agustus 2021

Jam : 13.00

Tempat : Ruang 5 Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

PANITIA PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Sudirman, SE, M.E.I	Ketua	1. _____
2. Hasminidiarty, SE, M.Si	Sekretaris	2. _____
3. Hj. Susilawati, SE, M.Si	Penguji Utama	3. _____
4. Dr. Evi Adriani, SE, M.Si	Anggota	4. _____

Disahkan Oleh,

Dekan
Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA

Hj. Susilawati, SE, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Mutia Putri

NIM : 1700860201003

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing : Dr. Evi Adriani, SE, M.Si / Hasminidiarty, SE, M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemeparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil rekayasa, bahwa skripsi ini adalah karya orisinil bukan hasil plagiarisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unbari. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

Dian Mutia Putri

NIM. 1700860201003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Suwandi, SE dan ibunda R. Apriyanti, SE yang selalu memberikan kasih sayang, doa yang tulus dan dukungan moril maupun materil kepada penulis dan keluarga yang selalu memberikan semangat serta do'a yang tulus.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Susilawati, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Evi Adriani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hasminidiarty, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan memperlancar aktivitas penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-temanku Elya Khomsyatun, Yulianti dan Naomi Valeria H, terima kasih atas bantuan, dorongan semangat, kebersamaan dan berbagi suka duka selama kuliah yang tak terlupakan, semoga kita sukses bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan ketidaksempurnaan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah pustaka dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, 07 Juli 2021

Dian Mutia Putri

ABSTRAK

(DIAN MUTIA PUTRI / 1700860201003 / Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019 / Pembimbing I Dr. Evi Adriani, SE, M.SI / Pembimbing II Hasminidiarty, SE, M.Si)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah atas sumber daya alam dan potensi-potensi penerimaan daerah, yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. (2) Pengaruh langsung dana perimbangan terhadap belanja modal. (3) Pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. (4) Pengaruh langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. (5) Pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. (6) Pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. (7) Pengaruh tidak langsung dana perimbangan melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data panel yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan asli daerah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. (2) Pendapatan asli daerah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (3) Belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (4) Pendapatan asli daerah secara tidak langsung melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (5) Dana perimbangan secara tidak langsung melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan penerimaan daerah dengan efektif dan efisien, dan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Analisis Regresi

ABSTRACT

(DIAN MUTIA PUTRI / 1700860201003 / The Effect of Local Revenue and Balance Fund on Capital Expenditure And Its Impact On Economic Growth In Jambi Province In 2014-2019 / Pembimbing I Dr. Evi Adriani, SE, M.SI / Pembimbing II Hasminidiarty, SE, M.Si)

In the implementation of regional autonomy, the local government has the authority to manage the regional wealth of natural resources and the potentials of regional revenues, which will be used to finance regional development, in order to increase economic growth to prosper the community. This study aims to find out: (1) The direct effect of local revenue on capital expenditure. (2) The direct effect of balance fund on capital expenditure. (3) The direct effect of the local revenue on economic growth. (4) The direct effect of balance fund on economic growth. (5) The direct effect of capital expenditure on economic growth. (6) Indirect effect of local revenue through capital expenditures on economic growth. (7) The indirect effect of balance fund through capital expenditures on economic growth.

In this study, the secondary data type used a panel data consisting of 9 regencies and 2 cities in Jambi Province in the period 2014-2019. The data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Financial Balance (DJPK). This study uses multiple linear regression analysis tools.

The results showed that: (1) The local revenue directly did not have a significant effect on capital expenditures, while the balance fund had a significant effect on capital expenditures. (2) The local revenue directly did not have a significant effect on economic growth, while the balance fund had a significant effect on economic growth. (3) The capital expenditures directly affect economic growth. (4) The local revenue indirectly through capital expenditures has no significant effect on economic growth. (5) The balance funds indirectly through capital expenditures has no significant effect on economic growth.

Based on the results of this study is expected to provide benefits for local governments to utilize regional revenues effectively and efficiently, and become input material for researchers next to get better results.

Keyword : *Local Revenue, Balance Fund, Capital Expenditures, Economic Growth Regression Analysis*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.1.1 Landasan Teori	17
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
2.1.1.3 Belanja Modal	21
2.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah	23
2.1.1.5 Dana Perimbangan	25
2.1.2 Penelitian Terdahulu	29
2.1.3 Kerangka Pemikiran	33
2.1.4 Hipotesis	35
2.2 Metode Penelitian	36
2.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan	36
2.2.2 Jenis dan Sumber Data	36
2.2.3 Metode Pengumpulan Data	37
2.2.4 Metode Analisis	37
2.2.4.1 Uji Asumsi Klasik	37
2.2.4.2 Model Path Analysis Melalui Analisis Regresi Linear Berganda	38
2.2.4.3 Koefisien Determinasi	45
2.2.4.4 Uji Hipotesis	46

2.2.5	Operasional Variabel Penelitian	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN		
3.1	Keadaan Umum	49
3.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	52
3.3	Perkembangan Belanja Daerah di Provinsi Jambi	56
3.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi	59
3.5	Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Jambi	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	64
4.1.1	Uji Asumsi Klasik	64
4.1.2	Estimasi Analisis Regresi	67
4.1.3	Path Analysis	70
4.1.4	Koefisien Determinasi	77
4.1.5	Uji Hipotesis	78
4.2	Analisis dan Pembahasan	85
4.2.1	Pengaruh Langsung Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	85
4.2.2	Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal	87
4.2.3	Pengaruh Langsung Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	88
4.2.4	Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	90
4.2.5	Pengaruh Langsung Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	91
4.2.6	Pengaruh Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	92
4.2.7	Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	94
4.3	Implikasi Kebijakan	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	96
5.2	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN		103

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019 (Persen)	5
1.2	Realisasi Belanja Modal di Provinsi Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)	6
1.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)	8
1.4	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)	9
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
2.2	Operasional Variabel	48
3.1	Klasifikasi Kabupaten/Kota dan luas wilayah di Provinsi Jambi	50
3.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi (miliar rupiah) tahun 2019	53
3.3	Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 (Juta Rupiah)	58
3.4	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 (Juta Rupiah).....	59
3.5	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 (Juta Rupiah)	62
4.1	Hasil Uji Normalitas	65
4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.3	Hasil Regresi Linear Berganda Tahap I	67
4.4	Hasil Regresi Linear Berganda Tahap II	69
4.5	Nilai R Square Pada Regresi Tahap I	71
4.6	Nilai R Square Pada Regresi Tahap II	76
4.7	Hasil Koefisien Determinasi	77
4.8	Hasil Uji F Pada Regresi Tahap I	79
4.9	Hasil Uji F Pada Regresi Tahap II	80
4.10	Hasil Uji t Pada Regresi Tahap I	82
4.11	Hasil Uji t Pada Regresi Tahap II	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Skema Kerangka Pemikiran	34
2.2	Sub Struktur Jalur 1	40
2.3	Sub Struktur Jalur 2	41
2.4	Sub Struktur Jalur 3	43
2.5	Sub Struktur Jalur 4	43
3.1	Peta Provinsi Jambi	49
4.1	Sub Struktur Jalur 1	72
4.2	Sub Struktur Jalur 2	73
4.3	Sub Struktur Jalur 3	74
4.4	Sub Struktur Jalur 4	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019 (Dalam Miliar Rupiah)	103
2	Hasil Analisis Regresi	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Amin, 2019).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan merupakan suatu proses manifestasi pencapaian kesejahteraan yang nyata bagi penduduk suatu negara (Frisdiantara, 2018). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi atau pendapatan per kapita.

Terlaksananya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tergantung pemerintah daerah dan pemanfaatan keuangan daerah (Gafar, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah dalam APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Dalam proses pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Salah satu bagian dari belanja daerah yaitu belanja modal.

Belanja modal merupakan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di daerahnya. Pengeluaran anggaran dari belanja modal untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No.71 Tahun 2010). Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja untuk menambah asset tetap.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang dapat berupa belanja modal tanah, gedung dan bangunan, mesin,

infrastruktur dan belanja modal lainnya, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan untuk kemajuan di suatu daerah.

Perkembangan dan alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari kemampuan keuangan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh

pemerintah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

Dalam proses pembangunan disuatu daerah, dana yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan tidak hanya cukup dengan PAD saja karena porsi dari PAD belum mampu mencukupi kebutuhan daerah. Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah, hal ini dikarenakan penerimaan PAD disetiap daerah berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan untuk memajukan pembangunan di setiap daerah. Transfer dari pemerintah pusat tersebut berupa Dana Perimbangan.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dapat ditunjukkan dalam laju pertumbuhan ekonomi di setiap Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2014-2019 (Persen)

Wilayah	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kerinci	9,06	6,45	6,70	6,03	5,10	5,02	6,39
Merangin	7,13	5,48	6,21	5,55	5,17	4,51	5,68
Sarolangun	5,20	3,09	4,26	4,69	4,72	5,08	4,51
Batanghari	7,56	4,36	4,55	4,82	4,96	4,99	5,21
Muaro Jambi	8,03	5,24	5,43	5,06	5,27	5,06	5,68
Tanjung Jabung Timur	5,81	1,87	2,70	3,13	3,13	4,25	3,48
Tanjung Jabung Barat	5,85	3,98	3,14	4,25	6,89	5,15	4,88
Tebo	8,83	5,28	5,38	5,60	5,02	4,78	5,82
Bungo	6,74	5,13	5,20	5,67	4,72	4,34	5,30
Kota Jambi	8,17	5,56	6,81	4,68	5,48	5,33	6,01
Kota Sungai Penuh	7,54	7,06	6,51	6,24	5,54	5,12	6,34
Rata-rata	7,27	4,86	5,17	5,07	5,09	4,88	5,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2014-2019 mengalami kondisi naik turun setiap tahunnya. Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2019, Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mengalami rata-rata perkembangan laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu terjadi di Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 4.51%, sedangkan Kabupaten/Kota yang mengalami rata-rata perkembangan laju

pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 6.39%.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemerintah Provinsi Jambi berupaya dalam mengalokasikan belanja modal dengan tujuan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud. Berikut ini perkembangan realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019
(Juta Rupiah)

Wilayah	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kerinci	201.494	177.166	198.781	218.905	191.868	293.806	213.670
Merangin	243.001	291.298	340.726	301.758	207.241	226.728	268.459
Sarolangun	228.608	284.426	233.984	247.349	215.169	414.970	270.751
Batanghari	241.655	156.606	172.177	206.581	148.206	251.118	196.057
Muaro Jambi	336.338	302.531	268.531	368.236	292.728	322.194	315.093
Tanjung Jabung Timur	339.286	279.110	365.777	275.104	312.956	328.872	316.851
Tanjung Jabung Barat	598.558	268.727	225.111	418.013	419.657	697.230	437.883
Tebo	357.652	245.745	233.969	233.688	258.990	269.093	266.523
Bungo	195.187	172.423	110.596	156.057	203.211	234.629	178.684
Kota Jambi	296.096	385.128	424.195	419.316	445.809	432.100	400.441
Kota Sungai Penuh	158.048	177.939	212.004	173.331	194.683	176.535	182.090
Rata-rata	290.538	249.191	253.259	274.394	262.774	331.570	276.955

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2014-2019 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Terlihat dari rata-rata realisasi belanja modal tahun 2015 mengalami penurunan, dari Rp. 290,538 miliar pada tahun 2014 menurun menjadi Rp. 249,191 miliar pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016-2017. Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2019, Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mengalami rata-rata perkembangan belanja modal terendah yaitu terjadi di Kabupaten Bungo yaitu sebesar Rp. 178,684 miliar, sedangkan Kabupaten/Kota yang mengalami rata-rata perkembangan belanja modal terbesar terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar Rp. 437,883 miliar.

Dalam meningkatkan porsi belanja modal yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Berikut ini perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)

Wilayah	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kerinci	55.550	70.462	80.850	85.760	80.481	85.903	76.501
Merangin	67.200	76.949	56.873	86.702	89.304	106.160	80.531
Sarolangun	60.959	85.372	92.425	85.185	118.828	94.621	89.565
Batanghari	70.809	68.925	73.516	87.929	98.808	91.567	81.926
Muaro Jambi	61.631	63.662	60.630	77.926	90.305	93.794	74.658
Tanjung Jabung Timur	34.687	38.473	43.935	76.775	49.607	53.919	49.566
Tanjung Jabung Barat	75.796	68.040	85.934	98.779	101.840	120.220	91.768
Tebo	56.845	62.037	60.938	68.406	76.160	83.236	67.937
Bungo	107.019	105.277	114.818	183.133	133.848	140.327	130.737
Kota Jambi	246.427	263.925	287.525	397.327	338.891	393.429	321.254
Kota Sungai Penuh	33.199	36.246	36.632	31.420	34.184	34.900	34.430
Rata-rata	79.102	85.397	90.371	116.304	110.205	118.007	99.882

Sumber : Realisasi APBD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.3 realisasi PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2019 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Terlihat pada tahun 2014-2017 rata-rata perkembangan PAD mengalami peningkatan dari Rp. 79,102 miliar pada tahun 2014 meningkat hingga Rp. 116,304 miliar pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 perkembangan PAD mengalami penurunan sebesar Rp. 110,205 miliar, dan kembali terjadi peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 118,007 miliar. Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2019, Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mengalami rata-rata perkembangan PAD terendah yaitu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur yaitu sebesar Rp. 49,566 miliar, sedangkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mengalami rata-rata perkembangan PAD terbesar terjadi di Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 321,254 miliar.

Tabel 1.4
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)

Wilayah	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kerinci	673.545	657.794	788.040	799.918	802.840	849.466	761.934
Merangin	796.826	851.727	1.038.315	979.514	978.236	1.039.700	947.386
Sarolangun	724.073	698.857	802.410	768.388	848.082	972.212	802.337
Batanghari	759.028	686.321	892.440	928.625	888.246	963.265	852.988
Muaro Jambi	795.290	762.240	852.860	859.324	978.668	1.042.395	881.796
Tanjung Jabung Timur	784.453	733.466	968.373	896.259	901.488	959.088	873.855
Tanjung Jabung Barat	909.103	716.830	1.049.466	1.037.376	1.096.229	1.306.126	1.019.188
Tebo	701.915	654.487	828.097	780.757	806.443	842.319	769.003
Bungo	768.951	734.988	866.039	909.063	917.465	961.103	859.602
Kota Jambi	852.471	858.677	1.177.857	1.013.005	1.110.714	1.110.177	1.020.484
Kota Sungai Penuh	463.760	452.260	590.421	561.309	571.604	608.668	541.337
Rata-rata	748.129	709.786	895.847	866.685	900.001	968.593	848.174

Sumber : Realisasi APBD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.4 realisasi dana perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Terlihat pada tahun 2015 terjadi penurunan dari tahun 2014 yaitu dari Rp. 748,129 miliar pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 709,786 pada tahun 2015. Dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 895,847 miliar. Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2019, Kabupaten/Kota yang

mengalami rata-rata perkembangan dana perimbangan terendah terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp. 541,337 miliar, sedangkan Kabupaten/Kota yang mengalami rata-rata perkembangan dana perimbangan terbesar terjadi di Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 1,020,484 miliar.

Jika dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa adanya kenaikan pada pengeluaran belanja modal tidak diikuti dengan peningkatan pada laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Contohnya, jika dilihat pada tabel, rata-rata realisasi belanja modal mengalami peningkatan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari Rp. 253,259 miliar pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 274,394 miliar pada tahun 2017, sedangkan pada laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari 5.17% pada tahun 2016 turun menjadi 5.07% pada tahun 2017.

Selanjutnya jika dilihat pada tabel 1.2, tabel 1.3 dan tabel 1.4 menunjukkan bahwa realisasi kenaikan PAD dan dana perimbangan tidak selalu diikuti dengan peningkatan pada belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2014-2019, begitu pula sebaliknya. Contohnya jika dilihat pada tabel, rata-rata realisasi PAD mengalami peningkatan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari Rp. 90,371 miliar pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 116,304 miliar pada tahun 2017, sedangkan rata-rata realisasi dana perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2017 jika dibandingkan

dengan tahun 2016, yaitu dari Rp. 895,847 miliar pada tahun 2016 turun menjadi Rp. 866,685 miliar pada tahun 2017.

Pada rata-rata realisasi belanja modal mengalami kenaikan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari Rp. 253,259 miliar pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 274,394 miliar pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan adanya trend positif antara PAD dengan belanja modal, dikarenakan kenaikan PAD diikuti dengan kenaikan belanja modal pada tahun 2017, sedangkan dana perimbangan mengalami trend yang negatif terhadap belanja modal, hal ini dikarenakan penurunan dana perimbangan tidak diikuti dengan penurunan belanja modal pada tahun 2017, karena pada tahun 2017 belanja modal mengalami kenaikan dari tahun 2016.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nabila (2017) ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAK berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan trend kondisi yang terjadi di Provinsi Jambi, menyebabkan penulis tertarik untuk melanjutkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti. Jika pada penelitian sebelumnya variabel yang diteliti yaitu pengaruh PAD, DAU

dan DAK terhadap kemandirian keuangan daerah dan dampaknya terhadap alokasi belanja modal, maka pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu pada penelitian sebelumnya objek penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Perbedaan tingkat kemampuan keuangan yang berbeda di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dapat menimbulkan perbedaan alokasi belanja modal di setiap daerah, hal ini pula yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat pembangunan di setiap daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari penerimaan PAD di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang berbeda-beda dan perbedaan besarnya dana perimbangan yang diterima oleh setiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, besarnya penerimaan

PAD dan dana perimbangan dapat mempengaruhi pula besarnya alokasi belanja modal. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Peningkatan pada pengeluaran belanja modal tidak selalu diikuti dengan peningkatan pada laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2019.
2. Dari tabel realisasi PAD dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan rentang waktu tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa adanya kenaikan PAD tidak selalu diikuti dengan kenaikan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3. Dari tabel realisasi dana perimbangan dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan rentang waktu tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa adanya kenaikan Dana Perimbangan tidak selalu diikuti dengan kenaikan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ?

2. Bagaimana pengaruh langsung Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ?
6. Bagaimana pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ?
7. Bagaimana pengaruh tidak langsung Dana Perimbangan melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

2. Mengetahui pengaruh langsung Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
3. Mengetahui pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
4. Mengetahui pengaruh langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Eonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
5. Mengetahui pengaruh langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
6. Mengetahui pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
7. Mengetahui pengaruh tidak langsung Dana Perimbangan melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca serta pihak lain yang ingin menambah pengetahuan tentang pendapatan

yang digunakan untuk belanja modal, untuk memenuhi proses kegiatan pembangunan dengan membandingkan teori dan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Jambi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam mengoptimalkan pendapatan daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah. Pada Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2012). Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam proses pembangunan di suatu negara. Besar kecilnya

pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya ekonominya untuk menghasilkan output perekonomiannya (Frisdiantara, 2018). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan kapasitas perekonomian yang semakin besar yang dialami oleh suatu daerah dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Laju pertumbuhan PDB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

2.1.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Hamsiah, 2019).

Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis

belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Berikut ini adalah struktur APBD yang terdiri dari :

1) Pendapatan Daerah

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b) Dana perimbangan, yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2) Belanja Daerah

- a) Belanja tidak langsung, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b) Belanja langsung, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.1.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset tetap dan/atau asset lainnya atau menambah nilai asset tetap dan/atau asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012).

Asset tetap/asset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai asset K/L terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1) Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat

pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas

batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur. Yang termasuk ke dalam belanja modal ini yaitu : kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

6) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kewenangan daerah untuk memungut PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997

sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Undang-undang ini mencerminkan keleluasaan daerah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan dari daerahnya sendiri seperti pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. PAD bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa; Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 64 dikatakan bahwa; Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Untuk beberapa daerah retribusi daerah merupakan penyumbangan terbesar terhadap

pendapatan asli daerah dalam arti memberi sumbangsih lebih besar dari pada pajak daerah.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 huruf c dikatakan bahwa; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah.

2.1.1.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 mengatakan Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Selanjutnya dalam ayat 9 dikatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara Pada pasal 10 dikatakan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas :

- 1) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil terdiri atas :

- a) Bagi Hasil Pajak (BHP), Penerimaan pajak yang dibagi kepada pemerintah daerah adalah: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, maka kini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semuanya sudah diserahkan ke daerah.
 - b) Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) atau yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 11 ayat (1) berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Sebagai salah satu bentuk transfer dari pemerintah pusat yang mempunyai porsi jumlah terbesar dibandingkan komponen lainnya dalam dana perimbangan. DAU adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Tolak ukur keberhasilan DAU,

salah satunya adalah tercapainya pemerataan total penerimaan daerah per kapita yang sebaik-baiknya.

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, misalnya: reboisasi, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, dan bencana alam. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kegiatan DAK berdasarkan PP No. 104/2000 meliputi :

a) DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

- b) Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan saran dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Publikasi	Judul	Hasil Penelitian	Hubungan Antar Variabel
Gafar (2019)	Jurnal Akuntansi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku Utara 2014-2018)	Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa : - Pada hasil regresi linear berganda model I, PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. - Pada hasil regresi linear berganda model II masing-masing variabel PAD, DAU dan Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	- Semakin besar tingkat penerimaan PAD dan DAU dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pada Kinerja Keuangan. - Dan semakin besar tingkat penerimaan PAD, DAU dan meningkatnya Kinerja Keuangan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah Maluku Utara.

Forza, at all (2018)	Jurnal Akuntansi & Keuangan	Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi)	<p>Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD dan DAU secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. - Secara simultan PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, tetapi secara parsial hanya DAU dan Belanja Modal yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. - PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin besar tingkat penerimaan PAD dan DAU dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pada Belanja Modal. - Semakin besar tingkat penerimaan DAU dan porsi Belanja Modal dapat menyebabkan terjadinya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan peningkatan penerimaan PAD tidak dapat mempengaruhi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. - Peningkatan penerimaan PAD dan DAU melalui Belanja Modal dapat menyebabkan terjadinya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
----------------------	-----------------------------	---	---	--

Vanesha, at all (2019)	Jurnal Paradigma Ekonomika	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	<p>Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara simultan masing-masing variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. - Secara parsial variabel DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tinggi tingkat penerimaan DAK dapat menyebabkan peningkatan pada Belanja Modal, sedangkan peningkatan penerimaan PAD dan DAU tidak dapat mempengaruhi peningkatan pada Belanja Modal.
Dewi, at all (2017)	Jurnal Akuntansi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<p>Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. - Secara parsial PAD dan DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAU dan Belanja Modal tidak berpengaruh 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tinggi peningkatan penerimaan PAD dan DAK dapat menyebabkan terjadinya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tetapi pengaruhnya sangat kecil. - Sedangkan peningkatan penerimaan DAU dan Belanja Modal tidak dapat

			terhadap Pertumbuhan Ekonomi	menyebabka n peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
Irvan, at all (2013)	Jurnal Ekonomi Pembangunan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbanga n Terhadap Pertumbuha n Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa: - Pada hasil regresi linear berganda model I, PAD dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. - Pada hasil regresi linear berganda model II variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	- Semakin besar tingkat penerimaan PAD dan Dana Perimbangan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pada Belanja Modal. - Dan semakin besar tingkat penerimaan PAD dan Dana Perimbangan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan peningkatan penerimaan Belanja Modal tidak dapat mempengaruhi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

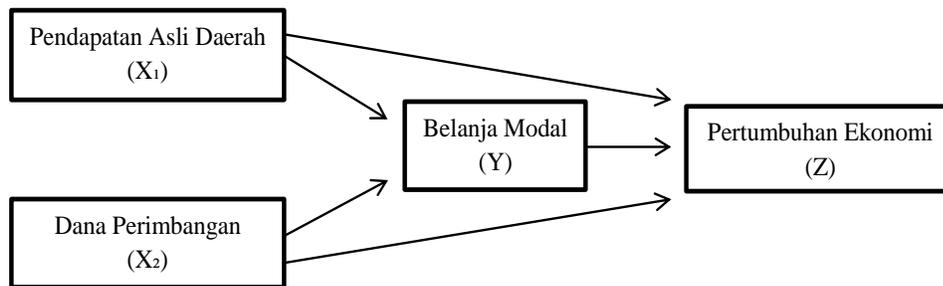
2.1.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Dan semakin baik alokasi PAD ke dalam belanja modal dapat meningkatkan proses pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh PAD terhadap besarnya alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Alokasi dana perimbangan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan lemah akan mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena dana perimbangan merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan

dalam hal ini di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, semakin besar/kecilnya dana perimbangan yang diperoleh daerah, maka dapat mempengaruhi besar/kecilnya alokasi belanja modal daerah tersebut. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dana perimbangan terhadap besarnya alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah yang dialokasikan dalam belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara parsial maupun simultan. Dan adanya pengaruh pendapatan asli

daerah dan dana perimbangan melalui belanja modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.1.4 Hipotesis

Berdasarkan pada landasan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
- H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
- H₃ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
- H₄ : Dana Perimbangan berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.
- H₅ : Belanja Modal berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019
- H₆ : Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

H₇ : Dana Perimbangan melalui Belanja Modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

2.2 Metode Penelitian

2.2.1 Metode Penelitian yang digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang dimana data penelitian berbentuk bilangan atau angka-angka (Syekh, 2011). Penelitian ini menggunakan data panel yaitu penggabungan antara data *time series* (runtun waktu) yaitu dari tahun 2014-2019 dan *cross section* (data silang) yaitu data Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan jumlah data *time series* sebanyak 6 tahun dan jumlah data *cross section* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebanyak 11 wilayah. Maka jumlah data panel pada penelitian ini yaitu sebanyak $n = 66$.

2.2.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu (Agung, 2017). Data yang diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan sumber data penelitian ini dilakukan dengan mengambil data yang diperoleh dari situs terkait antara lain yaitu :

- 1) Data PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal diambil dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id).
- 2) Data Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan diambil dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (www.jambi.bps.go.id).

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen (Agung, 2017). Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014-2019, dan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

2.2.4 Metode Analisis

2.2.4.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis perlu dilakukan pengujian asumsi klasik karena data yang akan dimasukkan dalam model path analysis harus memenuhi ketentuan

dan syarat dalam regresi berganda. Uji asumsi klasik tersebut antara lain adalah :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal, mendekati normal atau tidak. Uji normalitas dapat ditunjukkan jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan sebagai upaya untuk menentukan ada dan tidaknya korelasi yang sempurna atau mendekati hubungan yang sempurna (Sunyoto, 2011). Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas pada variabel-variabel independen (exogenous) jika korelasi antar variabel independen/bebas sangat tinggi, atau mendekati 1. Uji multikolinieritas dapat dilihat jika nilai tolerance untuk setiap variabel yang diuji > 0,10 dan nilai VIF < 10.

2.2.4.2 Model Path Analisis Melalui Analisis Regresi Linear

Berganda

Analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung

seperangkat variabel bebas (exogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Hartono, 2019). Model path analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu model mediasi melalui variabel perantara (intervening variabel) dimana kehadiran variabel Y sebagai variabel perantara akan mengubah pengaruh variabel X terhadap variabel Z.

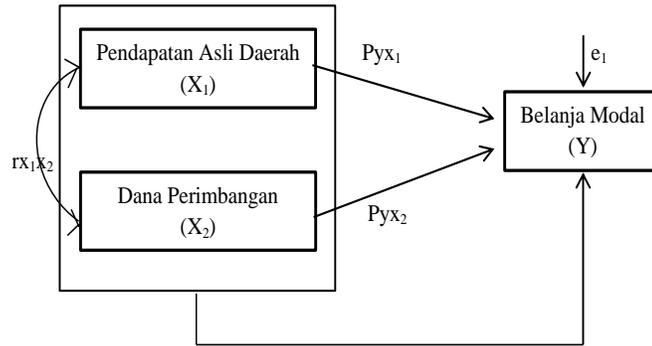
Pada analisis ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda secara bertahap. Analisis regresi linier berganda ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam menganalisis jalur dibutuhkan dua model persamaan regresi linier berganda.

Path analisis pada penelitian ini terdiri dari empat sub struktural, yaitu X_1 dan X_2 adalah variabel independen (exogenous), variabel Y sebagai variabel perantara dan variabel Z sebagai variabel dependen (endogenous). Sub struktural dan persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut :

1) Sub struktur jalur 1

Sub struktur jalur 1 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 1 dan 2 dimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara langsung berpengaruh terhadap belanja modal.

Gambar sub struktur jalur 1 yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.2 Sub Struktur Jalur 1

Persamaan struktur pada sub struktur jalur 1, yaitu :

$$Y = P_{YX_1} X_1 + P_{YX_2} X_2 + e$$

Dimana :

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Perimbangan

Y = Belanja Modal

P = Koefisien korelasi

e = *Error*

Untuk menjawab hipotesis penelitian 1 dan 2 yaitu pengaruh langsung variabel pendapatan asli daerah (X₁) dan dana perimbangan (X₂) terhadap variabel belanja modal (Y) dengan persamaan sebagai berikut:

- Pengaruh langsung X₁ terhadap Y.

$$X_1 \longrightarrow Y = P_{YX_1} \cdot P_{YX_1} \text{ (pengaruh langsung).}$$

- Pengaruh langsung X_2 terhadap Y .

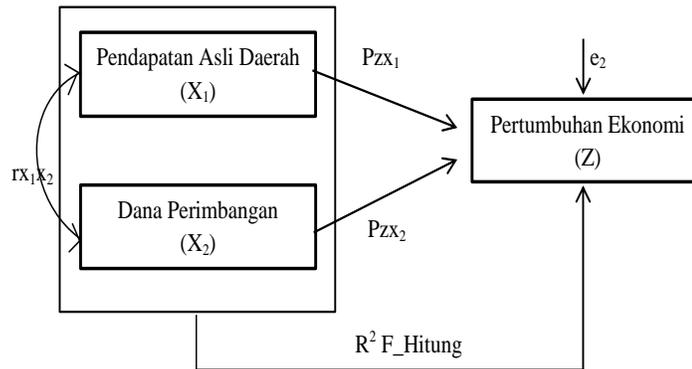
$$X_2 \longrightarrow Y = P_{YX_2} \cdot P_{YX_2} \text{ (pengaruh langsung).}$$

- Pengaruh langsung X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y .

$$X_1 \text{ dan } X_2 \longrightarrow Y = (P_{YX_1} \cdot P_{YX_1}) + (P_{YX_2} \cdot P_{YX_2}) \text{ (Pengaruh langsung).}$$

2) Sub struktur jalur 2

Sub struktur jalur 2 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 3 dan 4 dimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Gambar sub struktur jalur 2 yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.3 Sub Struktur Jalur 2

Persamaan struktur pada sub struktur jalur 2, yaitu :

$$Z = P_{ZX_1} X_1 + P_{ZX_2} X_2 + e$$

Dimana :

$$X_1 = \text{Pendapatan Asli Daerah}$$

X_2 = Dana Perimbangan

Z = Pertumbuhan Ekonomi

P = Koefisien korelasi

e = *Error*

Untuk menjawab hipotesis penelitian 3 dan 4 yaitu pengaruh langsung variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z) dengan persamaan sebagai berikut:

- Pengaruh langsung X_1 terhadap Z .

$$X_1 \longrightarrow Z = P_{ZX_1} \cdot P_{ZX_1} \text{ (pengaruh langsung).}$$

- Pengaruh langsung X_2 terhadap Z .

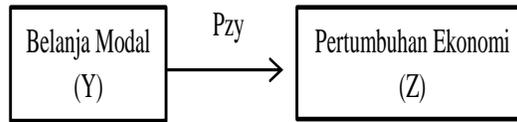
$$X_2 \longrightarrow Z = P_{ZX_2} \cdot P_{ZX_2} \text{ (pengaruh langsung).}$$

- Pengaruh langsung X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Z .

$$X_1 \text{ dan } X_2 \longrightarrow Z = (P_{ZX_1} \cdot P_{ZX_1}) + (P_{ZX_2} \cdot P_{ZX_2}) \text{ (Pengaruh langsung).}$$

3) Sub struktur jalur 3

Sub struktur jalur 3 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 5, yaitu belanja modal (Y) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Z). Gambar sub struktur jalur 3 yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.4 Sub Struktur Jalur 3

Persamaan struktur pada sub struktur jalur 3, yaitu :

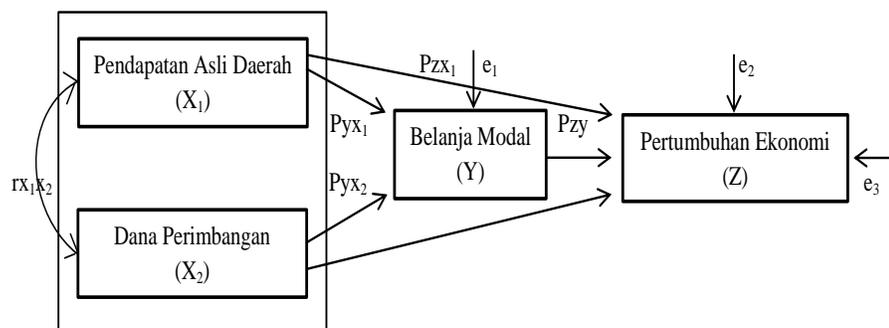
$$Z = Pzy.Y + e_3$$

- Pengaruh langsung Y terhadap Z

$$Y \longrightarrow Z = Pzy.Pzy$$

4) Sub struktur jalur 4

Sub struktur jalur 4 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 6 dan 7 yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan melalui belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Gambar sub struktur jalur 4 yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.5 Sub Struktur Jalur 4

Persamaan struktur pada analisis jalur 4, yaitu :

$$Z = P_{zx_1}.X_1 + P_{zx_2}.X_2 + P_{zy}.Y + e$$

Untuk menjawab hipotesis penelitian 6 dan 7 yaitu pengaruh langsung variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) melalui variabel belanja modal (Y) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z) dengan persamaan sebagai berikut:

- Pengaruh secara bersama-sama antara X_1 & Y terhadap Z
 $X_1 \longrightarrow Z \text{ melalui } Y = (P_{zx_1}) (P_{zx_1}) (P_{zy})$
- Pengaruh secara bersama-sama antara X_2 & Y terhadap Z
 $X_2 \longrightarrow Z \text{ melalui } Y = (P_{zx_2}) (P_{zx_2}) (P_{zy})$
- Pengaruh secara bersama-sama antara X_1 dan X_2 & Y terhadap Z
 $X_1 \text{ \& } X_2 \longrightarrow Z \text{ melalui } Y = (P_{zx_1}) (P_{yx_1}) (P_{zy}) + (P_{zx_2}) (P_{yx_2}) (P_{zy})$

Dimana :

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

Y = Belanja Modal

Z = Pertumbuhan Ekonomi

P_{yx_1} = Koefisien jalur PAD dengan belanja modal

P_{yx_2} = Koefisien jalur dana perimbangan dengan belanja modal

P_{zx_1} = Koefisien jalur PAD dengan pertumbuhan ekonomi

P_{zx_2} = Koefisien jalur dana perimbangan dengan pertumbuhan

ekonomi

$r_{x_1x_2}$ = korelasi pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan

e = *Error*

2.2.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai besaran nilai untuk mengekspresikan besarnya jumlah pengaruh semua variabel exogenous terhadap variabel endogenous secara gabungan atau disebut sebagai pengaruh gabungan (Sarwono, 2012). Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan oleh $0 < R^2 < 1$. Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi

- Jika R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika R^2 mendekati 0, berarti bahwa variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2.2.4.4 Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen/terikat secara bersama-sama (Sunyoto, 2011). Untuk melakukan pengujian hipotesis langkahnya adalah sebagai berikut :

H_0 = Tidak ada hubungan linear antara variabel independen exogenous PAD dan dana perimbangan dengan belanja modal.

H_a = Ada hubungan linear antara variabel independen exogenous PAD dan dana perimbangan dengan belanja modal.

Pengambilan keputusan perhitungan uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\alpha < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\alpha > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (H_0) (Widarjono, 2018). Uji t ini bertujuan untuk

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Nilai dari uji t dapat dilihat dari membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf signifikan 5% (Sarwono, 2012).

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Untuk menunjukkan pengaruh signifikan atau tidak kriterianya adalah sebagai berikut :

- Jika $\alpha < 0,05$, maka berpengaruh signifikan
- Jika $\alpha > 0,05$, maka tidak berpengaruh signifikan

2.2.5 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu :

1. Variabel Independent Exogenous (X)

Variabel independent (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka, variabel independent dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.

2. Variabel Intervening (Y)

Berfungsi sebagai variabel perantara untuk melihat pengaruh (X) terhadap (Z) melalui (Y). Maka, variabel perantara dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

3. Variabel Dependent Endogenous (Z)

Variabel dependent (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Maka, variabel dependent pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Secara lebih jelas gambaran kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Satuan
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Data laju pertumbuhan pendapatan asli daerah pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.	Rupiah (Rp)
2	Dana Perimbangan (X2)	Data laju pertumbuhan dana perimbangan pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.	Rupiah (Rp)
3	Belanja Modal (Y)	Data laju pertumbuhan belanja modal pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.	Rupiah (Rp)
4	Pertumbuhan Ekonomi (Z)	Data produk domestik regional bruto berdasarkan atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019.	Rupiah (Rp)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1 Keadaan Umum

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Berikut ini adalah peta wilayah Provinsi Jambi yang disajikan dalam gambar.

PETA WILAYAH PROVINSI JAMBI
MAP OF JAMBI PROVINCE



Gambar 3.1 Peta Provinsi Jambi

Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km². Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah luas wilayah di Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota yaitu :

Tabel 3.1
Klasifikasi Kabupaten/Kota dan luas wilayah di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas Area (Km ²)	Persentase (%)
1	Kerinci	Siulak	3.355,27	6,69
2	Merangin	Bangko	7.679,00	15,31
3	Sarolangun	Sarolangun	6.184,00	12,33
4	Batanghari	Muara Bulian	5.804,00	11,57
5	Muaro Jambi	Sengeti	5.326,00	10,62
6	Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak	5.445,00	10,86
7	Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal	4.649,85	9,27
8	Tebo	Muara Tebo	6.461,00	12,88
9	Bungo	Muara Bungo	4.659,00	9,29
10	Kota Jambi	Kota Baru	205,43	0,41
11	Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh/Siulak	391,5	0,78

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka 2020, BPS

Berdasarkan tabel 3.1 diatas daerah yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin yaitu sebesar 7.679 Km² atau sebesar 15,31% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184

Km², sedangkan daerah yang memiliki luas wilayah terkecil berada di Kota Jambi yaitu sebesar 205,43 Km² atau sebesar 0.41% dari total luas wilayah Provinsi Jambi.

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 141 Kecamatan, 1.375 desa dan 187 kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 215 Desa/Kelurahan.

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (Bappeda, 2010) :

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari.
3. Daerah dataran tinggi > 500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam proses pembangunan di suatu daerah, dalam hal ini untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB terbagi atas dua bagian yaitu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi (miliar rupiah) tahun 2014–2019.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi (Miliar Rupiah) tahun 2019

Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota					
	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.261,42	4.754	2.876,09	4.535,54	6.720,67	2.753,59
B. Pertambangan dan Penggalan	96,65	217	3.087,68	1.861,42	2.059,44	10.366,87
C. Industri Pengolahan	184,48	765	414,62	1.334,23	2.645,82	1.220,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,52	6	3,13	6,02	5,70	2,20
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah	22,34	17	13,68	9,77	14,97	10,24
F. Konstruksi	420,74	712	1.441,36	793,23	917,74	801,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran. Refarasi Mobil dan Sepeda Motor	618,38	1.127	634,57	919,81	834,74	996,23
H. Transportasi dan Pergudangan	172,36	190	211,06	177,64	566,75	185,78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56,55	205	217,30	47,66	105,93	58,76
J. Informasi dan Komunikasi	457,22	450	390,54	349,86	409,38	239,44
K. Jasa Keuangan dan Ansurasi	66,88	144	248,72	193,32	267,80	124,38
L. Real estet	112,96	217	140,26	139,50	204,84	98,87
M.N Jasa Perusahaan	2,69	14	25,71	8,61	194,90	183,59
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	353,06	344	411,30	466,56	503,07	298,33
P. Jasa Pendidikan	278,90	341	322,89	556,12	304,81	496,62
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,92	137	152,03	167,07	168,89	81,59
R.S.T.U Jasa lainnya	109,48	148	166,82	130,76	226,25	49,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.326,54	9.789	10.757,77	11.697,11	16.151,72	17.967,59

Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota					Jumlah
	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh	
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.724,15	5.190	2.507,84	190,88	238,21	39.752,39
B. Pertambangan dan Penggalian	13.146,14	931	2.827,59	425,97	36,69	35.056,45
C. Industri Pengolahan	5.478,44	643	818,58	2.249,76	31,33	15.785,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,11	6	5,12	35,80	1,03	77,63
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah	16,02	4	25,34	46,50	15,09	194,95
F. Konstruksi	1.394,44	769	1.595,82	1.943,29	583,95	11.373,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran. Refarasi Mobil dan Sepeda Motor	988,58	856	1.543,20	5.412,71	1.236,64	15.167,86
H. Transportasi dan Pergudangan	234,36	154	322,68	2.557,30	178,74	4.950,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130,59	40	323,46	476,26	53,09	1.714,6
J. Informasi dan Komunikasi	527,66	392	635,55	1.037,68	692,08	5.581,41
K. Jasa Keuangan dan Ansurasi	295,07	130	449,29	1.104,82	226,76	3.251,04
L. Real estet	197,08	191	294,44	510,07	125,71	2.231,73
M.N. Jasa Perusahaan	330,84	6	24,22	553,31	281,12	1.624,99
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,75	330	386,67	1.402,20	251,89	5.197,83
P. Jasa Pendidikan	520,03	228	622,78	924,88	429,45	5.025,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,06	98	94,53	534,36	118,08	1.803,53
R.S.T. U Jasa lainnya	164,92	194	80,87	155,35	109,81	1.535,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	30.745,22	10.161	12.557,97	19.561,13	4.609,66	150.324,71

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka 2020, BPS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Jambi pada tahun 2019 mengalami penerimaan yang berbeda-beda disetiap Kabupaten/Kota. perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, diantaranya yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Kontruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Refarasi Mobil dan Sepeda Motor. Dari semua kategori lapangan usaha pada PDRB tahun 2019 yang memiliki penerimaan terbesar terdapat pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar Rp. 39.752,39 miliar. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki penerimaan terkecil pada PDRB tahun 2019 yaitu dari sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp. 77,63 miliar.

Disetiap daerah memiliki penerimaan atas setiap jenis lapangan usaha pada PDRB yang berbeda-beda, berikut ini adalah penerimaan PDRB berdasarkan jenis lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2019 disetiap Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo memiliki penerimaan terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berturut-turut sebesar Rp. 3.261,42 miliar, Rp. 4.754 miliar, Rp. 4.535,54 miliar, Rp. 6.720,67 miliar dan Rp. 5.190 miliar.

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Bungo memiliki penerimaan terbesar dari

sektor pertambangan dan penggalian berturut-turut sebesar Rp. 3.087,68 miliar, Rp. 10.366,87 miliar, Rp. 13.146,14 miliar dan Rp. 2.827,59 miliar. Sedangkan Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh memiliki penerimaan terbesar dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berturut-turut sebesar Rp. 5.412,71 miliar dan Rp. 1.236,64 miliar.

3.3 Perkembangan Belanja Daerah di Provinsi Jambi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah untuk melaksanakan kegiatan perekonomian guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mengeluarkan dana dalam bentuk belanja daerah yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdapat pada APBD. Berikut ini adalah realisasi pengeluaran belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang ditunjukkan pada tabel 3.3.

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa pengeluaran belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 mengalami pengeluaran yang berbeda-beda disetiap Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang memiliki pengeluaran belanja daerah tertinggi terletak pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar Rp. 3.671.252 juta, dan daerah yang memiliki pengeluaran belanja daerah terendah terletak pada Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp. 1.656.206 juta. Berdasarkan jenis pengeluaran atas belanja daerah tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada pengeluaran belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 5.119.387 juta, dan pengeluaran terendah terjadi

pada pengeluaran belanja tidak langsung yaitu belanja bunga sebesar Rp. 0, karena disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2019 tidak memiliki pengeluaran atas belanja bunga.

Disetiap daerah memiliki jenis pengeluaran belanja daerah yang berbeda-beda, berikut ini adalah jenis pengeluaran belanja daerah yang memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2019 disetiap Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi dan Kota Sungai penuh memiliki pengeluaran terbesar pada belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai berturut-turut sebesar Rp. 497.096 juta, Rp. 546.843 juta, Rp. 486.018 juta, Rp. 524.643 juta, Rp 383.440 juta, Rp. 396.706 juta, Rp. 496.184 juta, Rp. 674.533 juta dan Rp. 293.394 juta. Sedangkan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pengeluaran terbesar pada belanja langsung yaitu belanja modal berturut-turut sebesar Rp. 414.970 juta dan Rp. 697.230 juta.

Dalam menciptakan kondisi yang seimbang di dalam APBD, pemerintah daerah sebaiknya harus mengimbangi peningkatan belanja daerah dengan cara meningkatkan penerimaan daerah sehingga antara penerimaan dan pengeluaran seimbang, dan tidak terjadi kelebihan pengeluaran yang menyebabkan alokasi anggaran tidak efisien.

Tabel 3.3
Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Kabupaten/Kota											Jumlah
	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh	
A. Belanja Tidak Langsung	820.101	857.621	627.960	786.992	767.397	568.098	679.063	593.654	751.091	735.877	409.984	7.597.836
1. Belanja Pegawai	497.096	546.843	393.452	486.018	524.643	383.440	427.079	396.706	496.184	674.533	293.394	5.119.387
2. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	2.000	1.200	1.000	0	6.138	4.309	1.000	0	0	15.647
4. Belanja Hibah	18.108	40.137	16.970	58.097	10.686	30.204	18.179	7.040	21.747	53.642	10.086	284.896
5. Belanja Bantuan Sosial	244	0	167	38.528	0	60	1.803	0	2.234	5.801	3.280	52.116
6. Belanja Bagi Hasil	0	3.204	0	0	5.557	2.247	3.263	2.064	2.840	0	0	19.175
7. Belanja Bantuan Keuangan	297.218	264.200	214.885	195.733	220.638	151.366	222.602	182.519	227.068	836	103.027	2.080.092
8. Pengeluaran Tidak Terduga	7.435	3.237	486,5	7.415	4.873	780,6	0	1.016	18,27	1,064	197,5	26.523
B. Belanja Langsung	510.635	591.345	797.326	554.865	658.016	620.758	1.023.349	526.182	635.791	925.487	399.327	7.243.080
1. Belanja Pegawai	0	67.498	6.702	5.770	58.865	56.935	58.059	9,10	47.522	31.97	2.405	303.796
2. Belanja Barang dan Jasa	216.828	297.118	375.654	297.976	276.957	234.950	268.060	257.079	353.639	493,355	220.387	3.292.003
3. Belanja Modal	293.807	226.729	414.970	251.119	322.194	328.873	697.230	269.094	234.630	432,100	176.536	3.647.281
C. Pembiayaan Daerah	101.733	35.241	239.175	38.482	121.311	75.233	266.429	35.154	64.769	172,998	37.584	1.188.108
Jumlah	2.763.204	2.933.174	3.089.748	2.722.195	2.972.136	2.452.944	3.671.252	2.274.825	2.838.532	3.495,726	1.656.206	30.869.941

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020

3.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat sehingga mendorong pemerintah untuk menaikkan belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah daerah ini tentunya ditunjang oleh peningkatan pendapatan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerahnya, pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah realisasi penerimaan PAD pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang ditunjukkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2019 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jenis Penerimaan				Jumlah
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	
1	Kab. Kerinci	13.854	2.815	8.779	60.455	85.904
2	Kab. Merangin	24.179	6.217	5.756	70.010	106.161
3	Kab. Sarolangun	17.361	2.912	8.296	66.053	94.621
4	Kab. Batanghari	21.649	7.880	10.477	51.562	91.567
5	Kab. Muaro Jambi	50.585	12.666	5.834	24.709	93.795
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	16.648	1.586	6.644	29.041	53.919
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	35.428	2.407	10.948	71.437	120.220
8	Kab. Tebo	26.218	3.266	6.681	47.071	83.236
9	Kab. Bungo	38.887	4.396	6.031	91.014	140.327

No	Kabupaten/Kota	Jenis Penerimaan				Jumlah
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	
10	Kota Jambi	255.915	38.541	9.783	89.191	393.430
11	Kota Sungai Penuh	7.653	2.828	11.199	13.221	34.901
	Jumlah	508.375	85.514	90.429	613.764	1.298.082

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan PAD disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2019 mengalami penerimaan yang berbeda-beda. Kabupaten/Kota yang menerima PAD tertinggi terletak pada Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 393.430 juta, dan daerah yang menerima PAD terendah terletak pada Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp. 34.901 juta.

Berdasarkan jenis penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kota Jambi sebesar Rp. 255.915 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 7.653 juta. Berdasarkan penerimaan atas retribusi daerah Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi terletak pada tahun 2019 yaitu pada Kota Jambi sebesar Rp. 38.541 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 1.586 juta.

Selanjutnya berdasarkan penerimaan atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi terletak

pada tahun 2019 yaitu pada Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 11.199 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah terletak pada tahun 2019 yaitu pada Kabupaten Merangin sebesar Rp. 5.756 juta. Berdasarkan penerimaan atas lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kabupaten Bungo sebesar Rp. 91.014 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah terletak pada tahun 2019 yaitu pada Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 13.221 juta.

Perbedaan penerimaan di setiap Kabupaten/Kota ini ditunjukkan karena adanya perbedaan atas sumber daya yang dimiliki oleh disetiap Kabupaten/Kota yang berbeda-beda dan adanya perbedaan pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan penerimaan PAD disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berbeda-beda. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan kekayaan daerah yang mereka miliki dengan efektif dan efisien maka penerimaan PAD yang diterima oleh pemerintah daerah akan maksimal, begitu pula sebaliknya jika pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan kekayaan daerah yang mereka miliki dengan efektif dan efisien maka penerimaan PAD yang diterima belum maksimal.

3.5 Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Jambi

Penerimaan daerah selain dari pendapatan asli daerah yaitu berasal dari transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas bagi hasil pajak,

bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pengalokasian dana perimbangan ditujukan untuk memberikan sumber pendanaan bagi APBD dan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Berikut ini adalah realisasi penerimaan dana perimbangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang ditunjukkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jenis Penerimaan				Jumlah
		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	
1	Kab. Kerinci	10,01	60,28	612,25	193,05	875,58
2	Kab. Merangin	16,68	52,00	740,89	272,34	1.081,91
3	Kab. Sarolangun	46,50	91,57	599,56	220,94	958,57
4	Kab. Batanghari	120,68	81,30	627,39	178,18	1.007,55
5	Kab. Muaro Jambi	96,18	72,04	699,02	199,40	1.066,64
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	65,41	122,82	564,42	211,19	963,84
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	124,96	423,50	536,18	175,21	1.259,84
8	Kab. Tebo	35,06	49,85	598,30	171,11	854,32
9	Kab. Bungo	27,46	81,34	656,11	213,58	978,49
10	Kota Jambi	77,22	60,74	757,40	239,35	1.134,71
11	Kota Sungai Penuh	11,19	57,40	447,90	112,80	629,29
	Jumlah	631,33	1.152,84	6.839,41	2.187,15	10.810,73

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2019, BPS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 mengalami penerimaan yang

berbeda-beda, Kabupaten/Kota yang menerima dana perimbangan tertinggi terletak pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar Rp. 1.259,84 juta, dan daerah yang menerima dana perimbangan terendah terletak pada Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp. 629,29 juta.

Berdasarkan jenis penerimaan bagi hasil pajak Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 124,96 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kabupaten Kerinci sebesar Rp. 10,01 juta. Berdasarkan jenis penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 423,50 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kabupaten Tebo sebesar Rp. 49,85 juta.

Selanjutnya berdasarkan jenis penerimaan dana alokasi umum Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kota Jambi sebesar Rp. 757,40 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 447,90 juta. Berdasarkan jenis penerimaan dana alokasi khusus Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kabupaten Merangin sebesar Rp. 272,34 juta, dan Kabupaten/Kota yang menerima pendapatan terendah pada tahun 2019 yaitu terletak pada Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 112,80 juta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi selama periode tahun 2014 hingga tahun 2019 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPK), dan data produk domestic regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari situs Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Analisis data dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Version 22 untuk menguji uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, path analysis, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian path analysis dapat dilakukan jika model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut yaitu data tersebut harus teruji secara normal, dan tidak mengandung multikolinearitas.

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat telah berdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13492483
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.053
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat pada tabel 4.1 diatas menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan syarat:

- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 data berdistribusi normal
- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 data tidak berdistribusi normal.

Pada tabel diatas menunjukkan nilai *Asymp Sig* sebesar 0,200 > 0,05 maka data berdistribusi normal, sehingga hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas pada variabel-variabel independen (exogenous). Model regresi yang baik yaitu jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat jika nilai tolerance untuk setiap variabel yang diuji $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.321	.643		-2.054	.044		
	LOG_X1	.019	.091	.021	.208	.836	.585	1.710
	LOG_X2	1.421	.291	.559	4.883	.000	.441	2.269
	LOG_Y	.482	.138	.323	3.487	.001	.673	1.486

a. Dependent Variable: LOG_Z

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai dari Variabel Independen yaitu :

- Nilai Tolerance X_1 sebesar $0,585 > 0,10$ atau VIF X_1 sebesar $1,710 < 10$, maka X_1 tidak terjadi multikolinieritas.
- Nilai Tolerance X_2 sebesar $0,441 > 0,10$ atau VIF X_1 sebesar $2,269 < 10$, maka X_2 tidak terjadi multikolinieritas.
- Nilai Tolerance Y sebesar $0,673 > 0,10$ atau VIF Y sebesar $1,486 < 10$, maka Y tidak terjadi multikolinieritas.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (Y) dalam model regresi.

4.1.2 Estimasi Analisis Regresi

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan 2 tahap analisis regresi. Berikut ini hasil uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini.

1) Regresi Linear Berganda Tahap I

Pada analisis regresi linear berganda tahap I yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas PAD (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap variabel terikat yaitu belanja modal (Y). Hasil uji analisis regresi linear berganda tahap I dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Regresi Linear Berganda Tahap I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.570	.581		-.979	.331		
	LOG_X1	-.048	.083	-.078	-.576	.567	.588	1.701
	LOG_X2	1.054	.230	.619	4.590	.000	.588	1.701

a. Dependent Variable: LOG_Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

$$Y = -0,570 - 0,048 X_1 + 1,054 X_2$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. Nilai konstanta sebesar -0,570 artinya apabila variabel independen yaitu X_1 dan X_2 bernilai nol (0), maka variabel dependen belanja modal (Y) akan bernilai tetap sebesar -0,570%.
2. Koefisien regresi variabel X_1 bernilai negatif sebesar -0,048 artinya apabila variabel X_1 (PAD) mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y (belanja modal) akan mengalami penurunan sebesar 0,048%.
3. Koefisien regresi variabel X_2 bernilai positif sebesar 1,054 artinya apabila variabel X_2 (dana perimbangan) mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y (belanja modal) akan mengalami peningkatan sebesar 1,054%.

2) Regresi Linear Berganda Tahap II

Pada analisis regresi linear berganda tahap II yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas PAD (X_1), dana perimbangan (X_2) dan belanja modal (Y) terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Z). Hasil uji analisis regresi linear berganda tahap II dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Regresi Linear Berganda Tahap II

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.321	.643		-2.054	.044		
	LOG_X1	.019	.091	.021	.208	.836	.585	1.710
	LOG_X2	1.421	.291	.559	4.883	.000	.441	2.269
	LOG_Y	.482	.138	.323	3.487	.001	.673	1.486

a. Dependent Variable: LOG_Z

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

$$Z = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.Y + e$$

$$Z = -1,321 + 0,019 X_1 + 1,421 X_2 + 0,482 Y$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. Nilai konstanta sebesar -1,321 artinya apabila variabel independen yaitu X_1 , X_2 dan Y bernilai nol (0), maka variabel dependen (Z) akan bernilai tetap sebesar -1,321%.
2. Koefisien regresi variabel X_1 bernilai positif sebesar 0,019 artinya apabila variabel X_1 (PAD) mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Z (pertumbuhan ekonomi) akan mengalami peningkatan sebesar 0,019%.
3. Koefisien regresi variabel X_2 bernilai positif sebesar 1,421 artinya apabila variabel X_2 (dana perimbangan) mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka

variabel Z (pertumbuhan ekonomi) akan mengalami peningkatan sebesar 1,421%.

4. Koefisien regresi variabel Y bernilai positif sebesar 0,482 artinya apabila variabel Y (belanja modal) mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Z akan mengalami peningkatan sebesar 0,482%.

4.1.3 Path Analysis

Pengujian path analisis dilakukan dengan 2 cara yaitu sesuai dengan 2 tahap analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini. Penggunaan Path analisis bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung antara variabel bebas (exogen) terhadap variabel terikat (endogen), dimana kehadiran variabel Y sebagai variabel perantara akan mengubah pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Path analysis dalam penelitian ini menggunakan 4 model sub struktural dalam pengujiannya. Sub struktural dan persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut :

1) Sub Struktural Jalur 1

Sub struktur jalur 1 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 1 dan 2 dimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara langsung berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil uji path analisis pada sub struktural jalur 1 dapat dilihat pada hasil regresi linear berganda tahap I pada tabel 4.3.

Persamaan model pada sub struktur jalur 1

$$Y = P_{yx1} X_1 + P_{yx2} X_2 + e$$

$$Y = -0,078 X_1 + 0,619 X_2$$

Untuk menjawab hipotesis penelitian 1 dan 2 yaitu pengaruh langsung variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap variabel belanja modal (Y), adapun penjelasannya sebagai berikut.

- Analisis pengaruh X_1 terhadap Y

Pada analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel $X_1 = 0,567 > 0,05$, maka variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y .

- Analisis pengaruh X_2 terhadap Y

Pada analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel $X_2 = 0,000 < 0,05$, maka variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y .

Untuk menentukan nilai e_1 maka dapat dilihat pada tabel 4.5 Sebagai berikut :

Tabel 4.5
Nilai R Square Pada Regresi Tahap I

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.572 ^a	.327	.306	.12584	.944

a. Predictors: (Constant), LOG_X2, LOG_X1

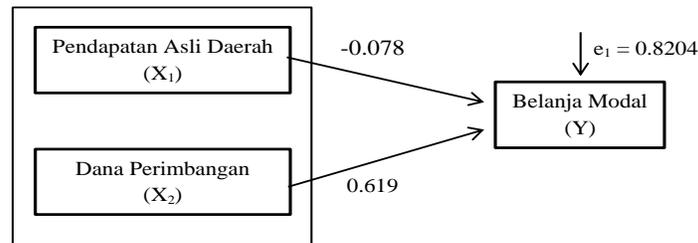
b. Dependent Variable: LOG_Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

$$e_1 = \sqrt{1 - R \text{ square}}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,327} = 0,8204$$

Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut :



Gambar 4.1 Sub Struktur Jalur 1

2) Sub Struktural Jalur 2

Sub struktur jalur 2 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 3 dan 4 dimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji path analisis pada sub struktural jalur 2 dapat dilihat pada hasil regresi linear berganda pada tabel 4.4.

Persamaan model pada sub struktur jalur 2

$$Z = Pzx_1 X_1 + Pzx_2 X_2 + e$$

$$Z = 0,021 X_1 - 0,559 X_2$$

Untuk menjawab hipotesis penelitian 3 dan 4 yaitu pengaruh langsung variabel pendapatan asli daerah (X₁) dan dana perimbangan (X₂) terhadap

variabel pertumbuhan ekonomi (Z), adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

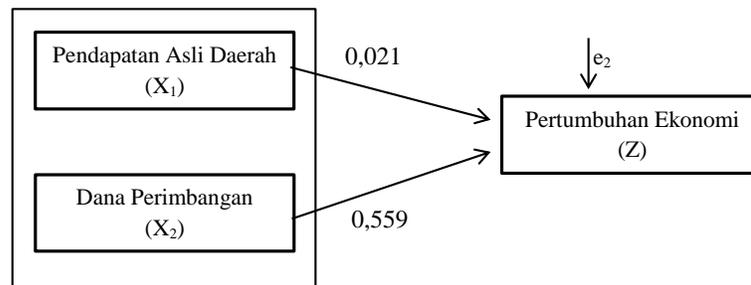
- Analisis pengaruh X_1 terhadap Z

Pada analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X_1 = 0,836 > 0,05, maka variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z.

- Analisis pengaruh X_2 terhadap Z

Pada analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X_2 = 0,000 < 0,05, maka variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap Z.

Dengan demikian diperoleh model diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Sub Struktur Jalur 2

3) Sub Struktural Jalur 3

Sub struktur jalur 3 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 5, yaitu belanja modal (Y) berpengaruh terhadap pertumbuhan

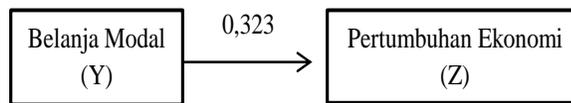
ekonomi (Z). Hasil uji path analisis pada sub struktural jalur 3 dapat dilihat pada hasil regresi linear berganda pada tabel 4.4.

Persamaan model pada sub struktur jalur 3, yaitu :

$$Z = Pzy.Y + e$$

$$Z = 0,323 Y$$

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel $Y = 0,001 < 0,05$, maka variabel Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Dengan demikian diperoleh model diagram jalur model struktur 3 sebagai berikut :



Gambar 4.3 Sub Struktur 3

4) Sub Struktural Jalur 4

Sub struktur jalur 4 untuk menggambar struktur jalur pada hipotesis penelitian 6 dan 7 yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan melalui belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji path analisis pada sub struktural jalur 4 dapat dilihat pada hasil regresi linear berganda pada tabel 4.4.

Persamaan model pada sub struktur jalur 4, yaitu :

$$Z = Pzx1.X1 + Pzx2.X2 + Pzy.Y + e$$

$$Z = 0,021 X_1 + 0,559 X_2 + 0,323 Y$$

Untuk menjawab hipotesis penelitian 6 dan 7 yaitu pengaruh tidak langsung variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) melalui variabel belanja modal (Y) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z), adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

- Analisis pengaruh X_1 melalui Y terhadap Z

Diketahui bahwa pengaruh langsung X_1 terhadap Y sebesar $-0,078$, sedangkan pengaruh tidak langsung X_1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X_1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu : $-0,078 \times 0,323 = -0,0252$. Maka pengaruh total yang diberikan X_1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu: $0,021 + (-0,0252) = -0,0042$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar $0,021$ dan pengaruh tidak langsung sebesar $-0,0252$ yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung ($-0,0252 < 0,021$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X_1 melalui Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z .

- Analisis pengaruh X_2 melalui Y terhadap Z

Diketahui bahwa pengaruh langsung X_2 terhadap Y sebesar $0,619$, sedangkan pengaruh tidak langsung X_2 melalui Y terhadap Z adalah

perkalian antara nilai beta X₂ terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu : 0,619 x 0,323 = 0,1999. Maka pengaruh total yang diberikan X₂ terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu: 0,559 + 0,1999 = 0,7589. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,559 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,1999 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung (0,1999 < 0,559). Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X₂ melalui Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z.

Untuk menentukan nilai e₂ maka dapat dilihat pada tabel 4.6 Sebagai berikut :

Tabel 4.6
Nilai R Square Pada Regresi Tahap II

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 ^a	.642	.625	.13815	.661

a. Predictors: (Constant), LOG_Y, LOG_X1, LOG_X2

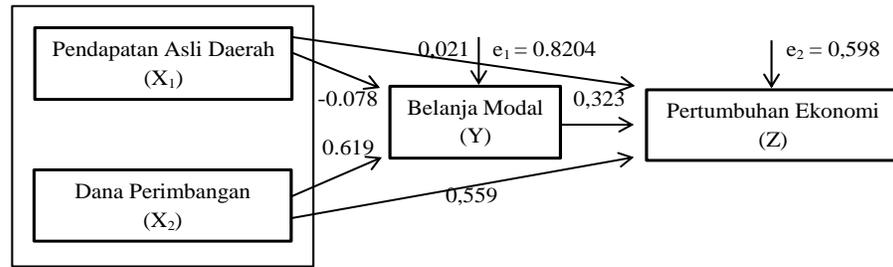
b. Dependent Variable: LOG_Z

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

$$e_2 = \sqrt{1 - R \text{ square}}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,642} = 0,598$$

Dengan demikian diperoleh model diagram jalur model struktur 4 yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.4 Sub Struktur 4

4.1.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai besaran nilai untuk mengekspresikan besarnya jumlah pengaruh semua variabel exogenous terhadap variabel endogenous secara gabungan. Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan oleh $0 < R^2 < 1$. Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

**Tabel 4.7
Nilai Koefisien Determinasi**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 ^a	.642	.625	.13815	.661

a. Predictors: (Constant), LOG_Y, LOG_X1, LOG_X2

b. Dependent Variable: LOG_Z

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,642 yang artinya

bahwa besarnya kontribusi variabel pad (X_1), dana perimbangan (X_2), dan belanja modal (Y) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar ($0,642 \times 100 = 64,2\%$), sedangkan sisanya ($100\% - 64,2\% = 35,8\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

4.1.5 Uji Hipotesis

1) Uji F (Uji Simultan)

Pengambilan keputusan perhitungan uji F dilakukan dengan 2 cara yaitu sesuai dengan 2 tahap analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini. Perhitungan uji F dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel.

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\alpha < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\alpha > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Untuk menginterpretasikan data pada model regresi tahap I pada penelitian ini maka hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), dan

Dana Perimbangan (X_2) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), dan Dana

Perimbangan (X_2) secara bersama-sama terhadap Belanja

Modal.

Uji F pada model regresi tahap I dapat dilihat pada tabel 4.8

Sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji F Pada Regresi Tahap I

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.485	2	.243	15.315	.000 ^b
	Residual	.998	63	.016		
	Total	1.483	65			

a. Dependent Variable: LOG_Y

b. Predictors: (Constant), LOG_X2, LOG_X1

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8, hasil perhitungan dengan menggunakan program spss dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 15,315 dengan membandingkan F_{tabel} $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas pembilang (banyaknya $K = 2$ dan $N = 66$) maka derajat penyebutnya $(N-K-1) = 63$, didapat F_{tabel} sebesar 3,14. F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($15,315 > 3,14$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y), yang artinya dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal.

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data pada model regresi tahap II pada penelitian ini maka hipotesis yang digunakan yaitu :

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (Y) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z).

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (Y) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z).

Uji F pada model regresi tahap II dapat dilihat pada tabel 4.9 Sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji F Pada Regresi Tahap II

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.121	3	.707	37.049	.000 ^b
	Residual	1.183	62	.019		
	Total	3.305	65			

a. Dependent Variable: LOG_Z

b. Predictors: (Constant), LOG_Y, LOG_X1, LOG_X2

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, hasil perhitungan dengan menggunakan program spss dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 37,049 dengan membandingkan F_{tabel} $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas pembilang (banyaknya $K = 3$ dan $N = 66$) maka derajat

penyebutnya $(N-K-1) = 62$, didapat F_{tabel} sebesar 3,15. Sehingga jika membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} maka didapatkan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($37,049 > 3,15$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (Y) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Z).

2) Uji t (Uji Parsial)

Pengambilan keputusan perhitungan uji t dilakukan dengan 2 cara yaitu sesuai dengan 2 tahap analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini. Nilai dari uji t dapat dilihat dari membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada taraf signifikan 5% (Sarwono, 2012).

- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, atau jika $\alpha < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.
- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, atau jika $\alpha > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.

Untuk menginterpretasikan data pada model regresi tahap I pada penelitian ini maka hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), dan

Dana Perimbangan (X_2) secara bersama-sama terhadap Belanja

Modal.

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), dan Dana Perimbangan (X_2) secara bersama-sama terhadap Belanja

Modal.

Uji t pada model regresi tahap I dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji t Pada Regresi Tahap I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.570	.581		-.979	.331
	LOG_X1	-.048	.083	-.078	-.576	.567
	LOG_X2	1.054	.230	.619	4.590	.000

a. Dependent Variable: LOG_Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Dengan nilai t-tabel $\alpha = 0,05$ dan $df (N-K-1) = 63$ maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,998. Berdasarkan Tabel diatas hasil pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengujian pada koefisien regresi pada variabel PAD (X_1)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi tahap I, hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel yang menunjukkan t-hitung sebesar 0.576 sedangkan t-tabel sebesar 1,998. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ yaitu $0,576 < 1,998$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak,

yang artinya secara parsial variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y .

- Pengujian pada koefisien regresi pada variabel Dana Perimbangan (X_2)

Hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel yang menunjukkan t-hitung sebesar 4,590 sedangkan t-tabel sebesar 1,998. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $4,590 > 1,998$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya secara parsial variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y .

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data pada model regresi tahap II pada penelitian ini maka hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (Y) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z).

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (Y) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z).

Uji t pada model regresi tahap II dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji t Pada Regresi Tahap II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.321	.643		-2.054	.044
	LOG_X1	.019	.091	.021	.208	.836
	LOG_X2	1.421	.291	.559	4.883	.000
	LOG_Y	.482	.138	.323	3.487	.001

a. Dependent Variable: LOG_Z

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Dengan nilai t-tabel $\alpha = 0,05$ dan $df (N-K-1) = 62$ maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,998. Berdasarkan Tabel diatas hasil pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengujian pada koefisien regresi pada variabel PAD (X_1)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi tahap II, hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel yang menunjukkan t-hitung sebesar 0,208 sedangkan t-tabel sebesar 1.998. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ yaitu $0,208 < 1,998$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z.

- Pengujian pada koefisien regresi pada variabel Dana Perimbangan (X_2)

Hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel yang menunjukkan t-hitung sebesar 4,883 sedangkan t-tabel sebesar

1,998. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $4,883 > 1,998$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya secara parsial variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z .

- Pengujian pada koefisien regresi pada variabel Belanja Modal (Y)

Hasil perbandingan antara $t\text{-hitung}$ dan $t\text{-tabel}$ yang menunjukkan $t\text{-hitung}$ sebesar 3,487 sedangkan $t\text{-tabel}$ sebesar 1,998. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $3,487 > 1,998$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya secara parsial variabel Y berpengaruh signifikan terhadap variabel Z .

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Langsung Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh langsung terhadap belanja modal di Provinsi Jambi tahun 2014-2019, hal ini tidak sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap belanja modal. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

($0,576 < 1,998$) dan nilai signifikan $0,567 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka tidak akan mempengaruhi semakin meningkatnya belanja modal, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah PAD maka tidak akan mempengaruhi semakin menurunnya belanja modal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2016) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sedangkan penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Vanesha (2019) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap belanja modal dikarenakan kontribusi penerimaan keseluruhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih kecil terhadap belanja modal. Sehingga pertumbuhan PAD tidak mempengaruhi besarnya belanja modal di Provinsi Jambi.

Dalam usahanya meningkatkan pengeluaran akan belanja modal, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD lebih optimal di setiap kabupaten/kota atau meningkatkan penerimaan daerah lain selain dari penerimaan PAD, agar pemerintah daerah mampu membiayai segala kegiatan daerahnya dan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Terjadinya peningkatan pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan

daerahnya memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah mampu dengan baik dalam mengelola keuangan daerahnya.

4.2.2 Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh langsung terhadap belanja modal di Provinsi Jambi tahun 2014-2019, hal ini sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap belanja modal. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($4,590 > 1,998$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka akan mempengaruhi semakin meningkatnya belanja modal, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah dana perimbangan maka akan mempengaruhi semakin menurunnya belanja modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Menurut Irvan (2016) yang menyatakan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara transfer di pemerintah pusat dengan belanja di pemerintah daerah. Berpengaruhnya dana perimbangan terhadap belanja modal karena terjadinya transfer yang

cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Implikasi hasil penelitian ini bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pengeluaran akan belanja modal, adalah dengan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan dikelola dengan sebaik-baiknya secara efisien, sehingga antara penerimaan dan pengeluaran seimbang dan tidak terjadi kelebihan pengeluaran yang menyebabkan alokasi anggaran tidak efisien.

4.2.3 Pengaruh Langsung Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketiga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2014-2019, hal ini tidak sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai t -hitung $< t$ -tabel ($0,208 < 1,998$) dan nilai signifikan $0,585 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka tidak mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya jika

semakin rendah PAD maka tidak mempengaruhi semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2016) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Forza (2018) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Menurut Forza (2018) yang menyatakan bahwa PAD yang merupakan cerminan retribusi, pajak dan lain-lain berperan untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD, salah satunya berasal dari hasil kekayaan daerah, jika hasil kekayaan daerah yang dikelola oleh daerah meningkat atau tingkat produksi masyarakat dalam mengelola kekayaan daerah meningkat maka tingkat penerimaan daerah akan meningkat pula yaitu yang ditandai pada peningkatan PDRB, sehingga hal ini dapat berdampak kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2.4 Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis keempat menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2014-2019, hal ini sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai t -hitung $>$ t -tabel ($4,883 > 1,998$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka akan mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah dana perimbangan maka akan mempengaruhi semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Irvan (2016) yang menyatakan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dengan belanja di pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

Implikasi hasil penelitian ini bahwa penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam memenuhi kebutuhan akan pembiayaan daerah. Transfer dana perimbangan ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengoptimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dengan harapan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.2.5 Pengaruh Langsung Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kelima menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2014-2019, hal ini sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai t -hitung $>$ t -tabel ($3,487 > 1,998$) dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal maka akan mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah belanja modal maka akan mempengaruhi semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sedangkan penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Forza (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil mengindikasikan bahwa belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka memaksimalkan pengeluaran akan belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien, maka akan berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2.6 Pengaruh Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis keenam menyatakan bahwa secara tidak langsung pendapatan asli daerah melalui belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Jambi tahun 2014-2019, hal ini tidak sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa secara tidak langsung PAD melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai pengaruh tidak langsung $<$ nilai pengaruh langsung $(-0,0252 < 0,021)$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung semakin tinggi PAD maka tidak akan mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah PAD maka tidak akan mempengaruhi semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2016) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai intervening. Menurut Irvan (2016) menyatakan bahwa pentingnya pengalokasian pendapatan asli daerah melalui belanja modal yang tepat sasaran sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena peran dana tersebut sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pengalokasian yang belum tepat untuk keperluan belanja daerah.

Pada hasil penelitian ini penerimaan PAD pada alokasi belanja modal belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD atau penerimaan

daerah lainnya, untuk digunakan pada kegiatan pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4.2.7 Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketujuh menyatakan bahwa secara tidak langsung dana perimbangan melalui belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2014-2019, hal ini tidak sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa secara tidak langsung dana perimbangan melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai pengaruh tidak langsung $<$ nilai pengaruh langsung ($0,1999 < 0,559$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung semakin tinggi dana perimbangan maka tidak akan mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah dana perimbangan maka tidak akan mempengaruhi semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, walaupun belum mampu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi dana perimbangan memiliki peran yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat.

Implikasi hasil penelitian ini bahwa dana perimbangan ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja yang bersifat investasi khususnya infrastruktur daerah. Apabila suatu daerah infrastrukturnya baik maka akan mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti sektor jasa, pertanian, dan lain-lain. Infrastruktur daerah yang baik akan membantu jalannya sektor perekonomian, sehingga hal ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan PDRB sehingga perekonomian daerah dapat mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

4.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat diperoleh beberapa implikasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan porsi belanja modal dalam upaya meningkatkan kebutuhan akan pembangunan daerah dibutuhkan penerimaan daerah berupa PAD yang lebih optimal disetiap Kabupaten/Kota, agar pemerintah daerah mampu membiayai segala kegiatan pembangunan daerah dan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat.
- b. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD, salah satunya berasal dari hasil kekayaan daerah, disetiap Kabupaten/Kota harus lebih meningkatkan

penerimaan daerah dengan mengelola kekayaan daerah dan meningkatkan tingkat produksi masyarakat dalam mengelola kekayaan daerah, hal ini dapat menyebabkan tingkat penerimaan daerah akan meningkat pula yaitu yang ditandai dengan peningkatan PDRB, sehingga hal ini dapat berdampak kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

- c. Dana transfer APBN yang diberikan kepada daerah diarahkan bagi penyediaan berbagai infrastruktur publik perlu terus ditingkatkan terutama pada daerah yang masih memiliki kemampuan keuangan daerah yang masih rendah, hal ini guna meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Dalam rangka memaksimalkan pengeluaran akan belanja modal dalam belanja APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus mengelola pengeluaran daerah dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien, sehingga akan meningkatkan output perekonomian yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- e. Pendapatan asli daerah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan pendapatan asli daerah tidak akan berdampak kepada peningkatan ataupun penurunan pada belanja modal.
- f. Dana perimbangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan dana perimbangan akan berdampak kepada peningkatan ataupun penurunan pada belanja modal.
- g. Pendapatan asli daerah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan pendapatan asli daerah tidak akan berdampak kepada peningkatan ataupun penurunan pada pertumbuhan ekonomi.
- h. Dana perimbangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-

2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan dana perimbangan akan berdampak kepada peningkatan ataupun penurunan pada pertumbuhan ekonomi.

- i. Belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan belanja modal akan berdampak kepada peningkatan ataupun penurunan pada pertumbuhan ekonomi.
- j. Pendapatan asli daerah secara tidak langsung melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan pendapatan asli daerah secara tidak langsung tidak akan berdampak kepada peningkatan ataupun penurunan pada pertumbuhan ekonomi.
- k. Dana perimbangan secara tidak langsung melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan dana perimbangan secara tidak langsung tidak akan berdampak kepada peningkatan ataupun penurunan pada pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada penelitian diatas diketahui bahwa pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi dari sektor-sektor ekonomi daerah agar dapat meningkatkan penerimaan atas pendapatan asli daerah sehingga daerah dapat pula mengoptimalkan pengeluaran akan belanja modal yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat.
- b. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan efektif dan efisien dana transfer dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan, yang diarahkan bagi kebutuhan akan kegiatan pembangunan daerah yang perlu terus ditingkatkan terutama pada daerah yang masih memiliki kemampuan keuangan yang masih rendah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan penerimaan daerah baik dari pendapatan daerah maupun dari dana transfer pemerintah pusat dengan efektif dan efisien agar dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, sebaiknya menggunakan lingkup yang lebih luas seperti menggunakan rentang

waktu yang lebih panjang, menambah variabel independen atau mengubah variabel yang telah digunakan yang belum dikaji pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. P. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UB Press. www.ipusnas.id
- Amin, F. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah : dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris. In *Penganggaran di Pemerintah Daerah : dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. UB Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&id=tg6QDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT24&dg=info:SwCNAXxVWZUJ:scholar.google.com/&ots=2dFjEPf5-4&sig=ye_RY8AHjyXuzBzzqXxJvYiJ-Pg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Dewi, Ni Wayan R, I. D. G. D. . (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*.
- Forza, Delta, Z. dan E. D. P. . (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi)*.
- Frisdiantara, C, I. M. (2018). *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*. Deepublish. www.ipusnas.id
- Gafar, A. A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku Utara 2014-2018)*.
- Hamsiah, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* (Issue February). Azkiya Publishing.
- Hartono. (2019). *Metodologi Penelitian : Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis dengan IBM® SPSS® Statistics Version 25*. Zanafa Publishing.
- Irvan, I. putu, & Karmini, N. L. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. *E-Jurnal EP Unud*, 338–362.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK. 02/2012. *Tentang Klasifikasi Anggaran*
- Sarwono, J. (2012). *Path Analysis dengan SPSS: Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*. PT Elex Media Komputindo.

www.ipusnas.id

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sunyoto, D. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*. CAPS.

Syekh, S. (2011). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial*. Gaung Persada.

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*

Vanesha, Venny Tria, S. R. dan P. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.jambi.bps.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi Tahun 2014-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Variabel			
			PAD (X ₁)	Dana Perimbangan (X ₂)	Belanja Modal (Y)	PDRB ADHK (Z)
1	Kabupaten Kerinci	2014	55,55	673,55	201,49	4.811,38
		2015	70,46	657,79	177,17	5.120,00
		2016	80,85	788,04	198,78	5.464,05
		2017	85,76	799,92	218,91	5.784,49
		2018	80,48	802,84	191,87	6.069,60
		2019	85,90	849,47	293,81	6.326,54
2	Kabupaten Merangin	2014	67,20	796,83	243,00	7.583,45
		2015	76,95	851,73	291,30	7.992,84
		2016	56,87	1.038,32	340,73	8.289,68
		2017	86,70	979,51	301,76	8.948,40
		2018	89,30	978,24	207,24	9.388,00
		2019	106,16	1.039,70	226,73	9.789,00
3	Kabupaten Sarolangun	2014	60,96	724,07	228,61	8.675,20
		2015	85,37	698,86	284,43	8.986,70
		2016	92,43	802,41	233,98	9.369,74
		2017	85,19	768,39	247,35	9.808,65
		2018	118,83	848,08	215,17	10.279,95
		2019	94,62	972,21	414,97	10.757,77
4	Kabupaten Batanghari	2014	70,81	759,03	241,66	9.298,57
		2015	68,93	686,32	156,61	9.695,29
		2016	73,52	892,44	172,18	10.146,14
		2017	87,93	928,63	206,58	10.634,36
		2018	98,81	888,25	148,21	11.147,66
		2019	91,57	963,27	251,12	11.697,11

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Variabel			
			PAD (X ₁)	Dana Perimbangan (X ₂)	Belanja Modal (Y)	PDRB ADHK (Z)
5	Kabupaten Muaro Jambi	2014	61,63	795,29	336,34	12.578,25
		2015	63,66	762,24	302,53	13.238,01
		2016	60,63	852,86	268,53	13.964,19
		2017	77,93	859,32	368,24	14.655,06
		2018	90,31	978,67	292,73	15.389,57
		2019	93,79	1.042,40	322,19	16.151,72
6	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2014	34,69	784,45	339,29	15.549,50
		2015	38,47	733,47	279,11	15.830,52
		2016	43,94	968,37	365,78	16.249,80
		2017	76,78	896,26	275,10	16.748,26
		2018	49,61	901,49	312,96	17.241,20
		2019	53,92	959,09	328,87	17.967,59
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2014	75,80	909,10	598,56	24.552,00
		2015	68,04	716,83	268,73	25.446,10
		2016	85,93	1.049,47	225,11	26.245,20
		2017	98,78	1.037,38	418,01	27.421,79
		2018	101,84	1.096,23	419,66	29.279,46
		2019	120,22	1.306,13	697,23	30.745,22
8	Kabupaten Tebo	2014	56,85	701,92	357,65	7.881,38
		2015	62,04	654,49	245,75	8.302,68
		2016	60,94	828,10	233,97	8.750,64
		2017	68,41	780,76	233,69	9.239,25
		2018	76,16	806,44	258,99	9.699,61
		2019	83,24	842,32	269,09	10.160,98
9	Kabupaten Bungo	2014	107,02	768,95	195,19	9.830,00
		2015	105,28	734,99	172,42	10.333,81
		2016	114,82	866,04	110,60	10.891,04
		2017	183,13	909,06	156,06	11.510,10
		2018	133,85	917,47	203,21	12.045,80
		2019	140,33	961,10	234,63	12.557,97

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Variabel			
			PAD (X ₁)	Dana Perimbangan (X ₂)	Belanja Modal (Y)	PDRB ADHK (Z)
10	Kota Jambi	2014	246,43	852,47	296,10	15.080,23
		2015	263,93	858,68	385,13	15.851,95
		2016	287,53	1.177,86	424,20	16.936,44
		2017	397,33	1.013,01	419,32	17.728,34
		2018	338,89	1.110,71	445,81	18.667,87
		2019	393,43	1.110,18	432,10	19.561,13
11	Kota Sungai Penuh	2014	33,20	463,76	158,05	3.460,94
		2015	36,25	452,26	177,94	3.705,36
		2016	36,63	590,42	212,00	3.946,47
		2017	31,42	561,31	173,33	4.183,87
		2018	34,18	571,60	194,68	4.388,18
		2019	34,90	608,67	176,54	4.609,66

REALISASI APBD 2014*Per 21 Oktober 2016**Jumlah: 542 daerah*

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
92	Prov. Jambi	1,281,239,472,808	1,514,518,389,008	818,059,263,041
93	Kab. Batanghari	70,809,104,650	759,028,847,941	241,655,990,899
94	Kab. Bungo	107,019,908,939	768,951,280,145	195,187,452,817
95	Kab. Kerinci	55,550,777,966	673,545,200,956	201,494,580,769
96	Kab. Merangin	67,200,333,089	796,826,317,818	243,001,657,477
97	Kab. Muaro Jambi	61,631,058,802	795,290,035,304	336,338,394,580
98	Kab. Sarolangun	60,959,222,149	724,073,803,681	228,608,954,976
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	75,796,250,362	909,103,238,718	598,558,941,309
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	34,687,282,552	784,453,159,939	339,286,741,294
101	Kab. Tebo	56,845,780,302	701,915,517,614	357,652,716,070
102	Kota Jambi	246,427,699,826	852,471,935,218	296,096,705,195
103	Kota Sungai Penuh	33,199,858,218	463,760,465,947	158,048,421,589

REALISASI APBD 2015*Per 2 Februari 2017*

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
92	Prov. Jambi	1,241,223,028,012	1,419,079,798,364	791,487,340,375
93	Kab. Batanghari	68,925,708,044	686,321,089,545	156,606,938,746
94	Kab. Bungo	105,277,046,266	734,988,352,007	172,423,482,338
95	Kab. Kerinci	70,462,409,629	657,794,535,662	177,166,582,221
96	Kab. Merangin	76,949,402,914	851,727,173,069	291,298,391,552
97	Kab. Muaro Jambi	63,662,790,891	762,240,159,225	302,531,328,269
98	Kab. Sarolangun	85,372,961,961	698,857,421,919	284,426,210,538
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	68,040,011,773	716,830,046,715	268,727,473,625
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	38,473,606,893	733,466,795,933	279,110,877,714
101	Kab. Tebo	62,037,299,487	654,487,852,457	245,745,363,137
102	Kota Jambi	263,925,520,119	858,677,840,368	385,128,743,988
103	Kota Sungai Penuh	36,246,931,834	452,260,982,970	177,939,732,342

REALISASI APBD 2016*Per 11 Oktober 2018***542 daerah**

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
92	Prov. Jambi	1,233,514,664,110	1,547,888,628,151	945,539,006,404
93	Kab. Batanghari	73,516,765,630	892,440,394,901	172,177,198,399
94	Kab. Bungo	114,818,287,091	866,039,389,648	110,596,439,444
95	Kab. Kerinci	80,850,837,270	788,040,379,762	198,781,596,688
96	Kab. Merangin	56,873,112,297	1,038,315,600,788	340,726,304,176
97	Kab. Muaro Jambi	60,630,301,196	852,860,226,856	268,531,407,849
98	Kab. Sarolangun	92,425,177,747	802,410,845,100	233,984,942,630
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	85,934,484,185	1,049,466,185,966	225,111,185,556
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	43,935,743,484	968,373,794,264	365,777,793,530
101	Kab. Tebo	60,938,006,779	828,097,862,720	233,969,731,320
102	Kota Jambi	287,525,214,004	1,177,857,284,208	424,195,954,890
103	Kota Sungai Penuh	36,632,476,994	590,421,034,074	212,004,597,663

REALISASI APBD 2017 (RINGKASAN)*Per 18 April 2019**Jumlah: 542 daerah*

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
92	Prov. Jambi	1,580,304,867,342	2,723,260,588,950	895,648,009,333
93	Kab. Batanghari	87,929,338,843	928,625,426,992	206,581,778,664
94	Kab. Bungo	183,133,678,700	909,063,377,858	156,057,609,902
95	Kab. Kerinci	85,760,743,969	799,918,426,092	218,905,091,227
96	Kab. Merangin	86,702,264,469	979,514,011,117	301,758,120,676
97	Kab. Muaro Jambi	77,926,789,369	859,324,679,526	368,236,687,926
98	Kab. Sarolangun	85,185,129,614	768,388,109,947	247,349,222,340
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	98,779,362,060	1,037,376,490,573	418,013,170,913
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	76,775,700,725	896,259,003,727	275,104,187,921
101	Kab. Tebo	68,406,126,028	780,757,475,197	233,688,059,239
102	Kota Jambi	397,327,847,289	1,013,005,895,282	419,316,595,969
103	Kota Sungai Penuh	31,420,979,313	561,309,821,992	173,331,166,028

REALISASI APBD 2018 (RINGKASAN)*Per 15 July 2019**Jumlah: 527 daerah*

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
92	Prov. Jambi	1,657,078,868,263	2,745,221,967,999	785,233,178,590
93	Kab. Batanghari	98,808,531,272	888,246,032,876	148,206,782,170
94	Kab. Bungo	133,848,451,059	917,465,257,753	203,211,813,790
95	Kab. Kerinci	37,787,025,126	699,972,574,705	182,483,153,334
96	Kab. Merangin	89,304,559,028	978,236,523,005	207,241,385,868
97	Kab. Muaro Jambi	83,379,727,576	865,944,877,200	292,728,025,310
98	Kab. Sarolangun	123,614,357,372	883,429,480,359	215,169,066,764
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	138,983,928,373	1,096,229,881,989	419,657,879,438
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	49,606,905,276	905,488,095,447	312,956,563,764
101	Kab. Tebo	76,160,028,618	806,443,699,184	258,990,826,317
102	Kota Jambi	338,980,181,746	1,110,607,638,388	438,488,049,995
103	Kota Sungai Penuh	34,184,049,670	571,604,008,621	194,683,207,114

Realisasi APBD 2019*Data dicetak pada 21 Oktober 2020**Jumlah: 542 daerah*

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
92	Prov. Jambi	1,651,089,944,335	2,896,753,806,401	866,500,805,931
93	Kab. Batanghari	91,567,449,215	963,265,456,033	251,118,803,753
94	Kab. Bungo	140,327,484,503	961,103,622,312	234,629,991,487
95	Kab. Kerinci	85,903,587,128	849,466,651,198	293,806,785,964
96	Kab. Merangin	106,160,970,250	1,039,700,153,727	226,728,661,843
97	Kab. Muaro Jambi	93,794,601,240	1,042,395,593,185	322,194,053,216
98	Kab. Sarolangun	94,621,365,981	972,212,674,454	414,970,363,981
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	120,220,481,668	1,306,126,943,112	697,230,245,559
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	53,919,302,033	959,088,814,692	328,872,997,320
101	Kab. Tebo	83,236,373,472	842,319,739,490	269,093,691,376
102	Kota Jambi	393,429,595,384	1,110,177,033,331	432,100,003,926
103	Kota Sungai Penuh	34,900,741,628	608,668,101,595	176,535,574,209

Lampiran 2
Hasil Analisis Regresi

A. Regresi Linear Berganda Tahap I

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.572 ^a	.327	.306	.12584	.944

a. Predictors: (Constant), LOG_X2, LOG_X1

b. Dependent Variable: LOG_Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.485	2	.243	15.315	.000 ^b
	Residual	.998	63	.016		
	Total	1.483	65			

a. Dependent Variable: LOG_Y

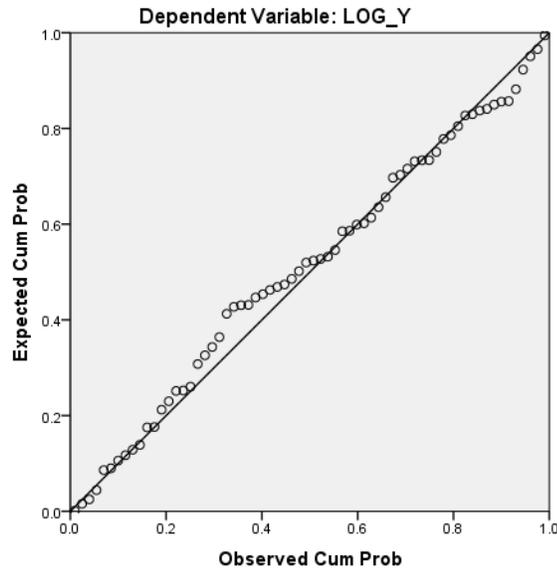
b. Predictors: (Constant), LOG_X2, LOG_X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.570	.581		-.979	.331		
	LOG_X1	-.048	.083	-.078	-.576	.567	.588	1.701
	LOG_X2	1.054	.230	.619	4.590	.000	.588	1.701

a. Dependent Variable: LOG_Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12389283
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.063
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

B. Regresi Linear Berganda Tahap II

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 ^a	.642	.625	.13815	.661

a. Predictors: (Constant), LOG_Y, LOG_X1, LOG_X2

b. Dependent Variable: LOG_Z

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.121	3	.707	37.049	.000 ^b
	Residual	1.183	62	.019		
	Total	3.305	65			

a. Dependent Variable: LOG_Z

b. Predictors: (Constant), LOG_Y, LOG_X1, LOG_X2

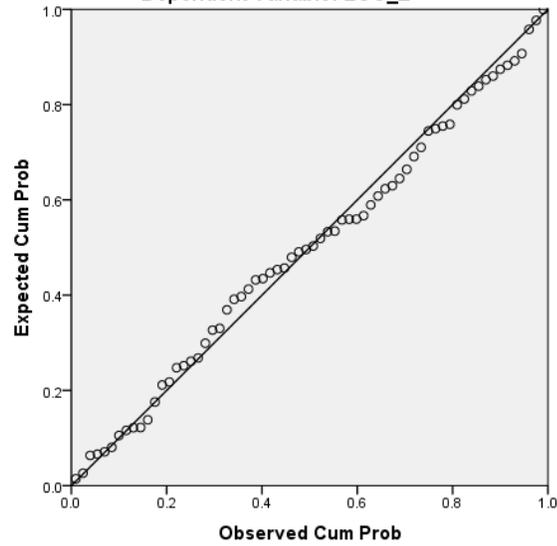
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.321	.643		-2.054	.044		
	X1	.019	.091	.021	.208	.836	.585	1.710
	X2	1.421	.291	.559	4.883	.000	.441	2.269
	Y	.482	.138	.323	3.487	.001	.673	1.486

a. Dependent Variable: Z

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LOG_Z



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13492483
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.053
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.